



THE ROLE OF PLANNER COMPETENCIES IN IMPROVING THE QUALITY OF REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING DOCUMENTS

Ivan Budi Susetyo^{1*}; Erwin Rahmandita²

^{1,2}Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia

¹email: ivan.budi@ecampus.ut.ac.id

²email: winerwin@ecampus.ut.ac.id

Article History

Submitted: 09 Desember 2025

Review : 10 Desember 2025

Accepted: 10 Desember 2025

Publish : 16 Desember 2025

Kata kunci (Keywords):

Planner competency;

Planning document quality;

Civil servants;

Regional development
planning;

Good governance;

Abstrak

The quality of regional development planning documents is strongly influenced by planners' competencies in conducting policy analysis, understanding regulatory frameworks, integrating cross-sectoral data, and formulating relevant and implementable policy alternatives. Recent developments in the competency framework for civil servants emphasize the need to strengthen both hard and soft skills, including data literacy, systemic thinking, inter-stakeholder collaboration, and evidence-based understanding of development dynamics. This article highlights the strategic role of functional planners in improving the quality of regional planning documents within an increasingly modern and adaptive bureaucracy. The analysis draws on contemporary theoretical perspectives and refers to the outcomes of functional planner training programs, which demonstrate a positive correlation between competency enhancement and improved planning quality. Overall, strengthening planners' capacity is a fundamental prerequisite for ensuring that planning documents are more accurate, responsive, and aligned with regional development needs.

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan fondasi bagi tercapainya pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dokumen perencanaan seperti RPJMD, RPJPD, RKPD, dan renstra pembangunan tidak sekadar berfungsi sebagai rencana administratif, tetapi sebagai instrumen strategis yang menentukan arah kebijakan, alokasi sumber daya, serta pelaksanaan program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Agar dokumen-dokumen tersebut berkualitas artinya komprehensif, realistis, responsif terhadap kondisi lokal, serta mampu diimplementasikan maka diperlukan peran aktif dari aparatur perencana yang memiliki kompetensi memadai (Zam, 2024).

Peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah menjadi isu strategis pasca penerapan desentralisasi dan tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Pemerintah daerah dituntut menghasilkan dokumen perencanaan yang akuntabel, partisipatif, berbasis data, sinkron, dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi. Dalam konteks tersebut, kompetensi perencana daerah merupakan faktor kunci karena perencana memegang kendali dalam proses perumusan, analisis, hingga finalisasi dokumen perencanaan Pembangunan (Setiawan, 2021).

* Penulis Korespondensi

Email: ivan.budi@ecampus.ut.ac.id

Sejumlah studi mutakhir pada tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa kompetensi teknis, manajerial, sosial-kultural, analitis, dan digital menjadi dasar *profesionalisme* ASN, termasuk perencana. Situasi di Indonesia menunjukkan bahwa jabatan fungsional perencana telah memperoleh legitimasi formal melalui regulasi nasional salah satunya yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Jabatan Fungsional Perencana yang mengatur standar kualifikasi, tugas, serta jenjang kariernya sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjamin profesionalisme dan integritas proses perencanaan pembangunan. Penataan kelembagaan ini sekaligus dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyusunan dokumen perencanaan daerah dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten, memahami prinsip-prinsip perencanaan berbasis data, serta memiliki kemampuan analisis kebijakan yang memadai.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan tahapan fundamental yang menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Pada konteks tersebut, aparatur sipil negara yang bertugas sebagai perencana memegang posisi strategis sebagai *policy think tank* yang bertanggung jawab melakukan analisis kebijakan, evaluasi pembangunan, serta menyusun rekomendasi yang berbasis data maupun kebutuhan riil masyarakat di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Para perencana diharapkan tidak hanya mampu mengelola proses penyusunan dokumen perencanaan, tetapi juga memastikan bahwa dokumen tersebut dapat berfungsi sebagai instrumen pengendali pembangunan, memiliki indikator kinerja yang terukur, dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam implementasinya (Aidil & Kusumawardhani, 2022). Dengan kapasitas tersebut, perencana menjadi aktor kunci dalam menjamin bahwa perencanaan tidak berhenti pada dokumen formal semata, melainkan benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif serta berkelanjutan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, aparatur yang bertugas dalam bidang perencanaan dituntut memiliki seperangkat kompetensi yang komprehensif untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan daerah, kompetensi tersebut meliputi :

1. Kompetensi teknis, yang mengacu pada kemampuan dalam memahami dan menerapkan proses serta metodologi perencanaan pembangunan daerah dan diukur melalui kualifikasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman kerja pada bidang teknis perencanaan.
2. Kompetensi manajerial, yang berkaitan dengan kemampuan mengelola tata kelola perencanaan, memimpin koordinasi lintas sektor, serta menjalankan fungsi strategis

pembangunan daerah dan diukur melalui tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau kepemimpinan, serta pengalaman dalam posisi manajerial.

3. Kompetensi sosial budaya, ditunjukkan dengan kemampuan dalam membangun komunikasi dan interaksi yang efektif dengan masyarakat yang beragam, serta memahami nilai-nilai sosial dan budaya lokal dalam proses Pembangunan, yang diukur melalui pengalaman bekerja dalam lingkungan multikultural dan keterlibatan dalam kegiatan yang mendorong partisipasi publik.

Hal ini sejalan dengan narasi dalam Buku Birokrasi dan Governansi Publik yang menegaskan bahwa kualitas SDM aparatur merupakan determinan utama kualitas pelayanan dan pemerintahan (Adia & Susetyo, 2022). Sementara itu, pada buku Evaluasi Pelatihan Organisasi Sektor Publik menjelaskan bahwa pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN adalah investasi strategis bagi peningkatan kinerja pemerintah (Sedarmayanti, 2018). Oleh karena itu, analisis mengenai peran kompetensi perencana penting untuk dilakukan dalam rangka memahami bagaimana kualitas dokumen perencanaan daerah dapat ditingkatkan secara sistematis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan terperinci bagaimana kompetensi perencana berperan dalam peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap proses penyusunan perencanaan di pemerintah daerah, tidak hanya dari sisi hasil dokumen, tetapi juga bagaimana dokumen tersebut disusun oleh para perencana dalam keseharian tugasnya (Ismail et al., 2022). Dengan metode ini, peneliti dapat menelusuri bagaimana kemampuan teknis, kemampuan manajerial, serta kemampuan sosial budaya para perencana diterapkan dalam proses penyusunan rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah. Selain itu, pendekatan ini memberikan ruang untuk melihat masalah yang mungkin tidak terlihat dari angka atau data statistik saja, seperti kendala koordinasi, komunikasi antarpegawai, dan akses terhadap data perencanaan.

Penelitian ini mengkaji berbagai teori, regulasi, dan penelitian terdahulu yang terkait dengan kompetensi perencana serta kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. Informasi yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui bagaimana kondisi kompetensi perencana saat ini, serta bagaimana dampaknya terhadap kejelasan, kelengkapan, dan kebermanfaatan dokumen perencanaan sebagai pedoman pembangunan. Dengan kata lain, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang lebih nyata dan menyeluruh mengenai pentingnya peningkatan kapasitas perencana untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga

relevan, dapat dilaksanakan, dan benar-benar mampu menjawab tantangan pembangunan daerah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki strategi pengembangan kapasitas aparatur perencana agar proses perencanaan pembangunan ke depan menjadi lebih efektif dan berdampak bagi masyarakat.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini dirumuskan melalui analisis mendalam terhadap data konseptual dalam *Buku Evaluasi Pelatihan Organisasi Sektor Publik untuk Meningkatkan Kompetensi ASN, Birokrasi dan Governansi Publik* (Diklat & ASN, 2025) serta didukung oleh berbagai literatur akademik terkini terkait peningkatan kapasitas perencana pembangunan daerah. Secara umum, temuan memperlihatkan bahwa kompetensi yang dimiliki perencana memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan pemerintah daerah. Semakin komprehensif kapasitas teknis, analitis, serta manajerial aparatur perencana, semakin tinggi pula kualitas dokumen perencanaan yang mampu disusun sebagai pedoman pembangunan yang efektif. Oleh karena itu, strategi peningkatan kualitas SDM perencana menjadi pilar utama dalam memperkuat kualitas tata kelola perencanaan pembangunan.

1. Peningkatan Kompetensi Perencana melalui Pelatihan Berjenjang

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelatihan fungsional jabatan perencana yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren Bappenas berkontribusi signifikan pada peningkatan profesionalisme perencana pemerintah daerah. Proses pelatihan berjenjang tersebut dilakukan secara terstruktur mulai dari *pre-test* untuk memetakan kemampuan awal peserta, *core training* yang mendalami teknik perencanaan, hingga *post-test* dan evaluasi kelulusan untuk mengukur capaian pembelajaran. Tidak hanya pada aspek pengetahuan teknis perencanaan, pelatihan ini juga menekankan pemahaman metodologi perencanaan pembangunan yang berbasis data dan logika kebijakan publik. Evaluasi pelatihan yang mencakup aspek reaksi, pembelajaran, perubahan perilaku kerja, hingga manfaat nyata bagi organisasi, terbukti meningkatkan kapabilitas perencana dalam menyusun dokumen perencanaan yang lebih sistematis, akuntabel, dan sesuai standar regulasi. Peningkatan kompetensi ini sekaligus memperkuat posisi perencana dalam proses pengambilan keputusan di daerah sehingga mereka tidak sekadar bertugas secara administratif, tetapi juga berperan sebagai analis kebijakan yang mampu memberikan rekomendasi strategis bagi keberhasilan pembangunan.

2. Penguasaan Analisis dan *Evidence-Based Planning* Sebagai Penentu Kualitas Dokumen

Hasil penelitian menegaskan bahwa kompetensi analitis merupakan fondasi utama dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah yang berkualitas. Penguatan kemampuan perencana dalam mengolah data, memahami indikator pembangunan, menganalisis dokumen evaluasi, serta melakukan sintesis kebijakan sangat menentukan ketepatan isu strategis yang diidentifikasi dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, Renstra, maupun Renja. Melalui pelatihan ASN, perencana didorong untuk mengembangkan penalaran berbasis bukti (*evidence-based planning*), sehingga proses perumusan program dan kegiatan tidak hanya berlandaskan keinginan politis atau rutinitas birokrasi, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan capaian pembangunan yang terukur. Kemampuan analitis ini juga memungkinkan perencana untuk menilai relevansi sasaran pembangunan, kelayakan pendanaan, serta kesesuaian arah kebijakan daerah dengan kebijakan nasional secara hierarkis dan fungsional. Dengan meningkatnya kapasitas tersebut, berbagai kesalahan konseptual dalam perencanaan seperti duplikasi program, ketidaksesuaian indikator, atau penyusunan target yang tidak rasional dapat diminimalkan. Karenanya, penguatan kompetensi analitis tidak hanya berpengaruh pada kualitas dokumen, tetapi juga memperkuat fungsi perencanaan sebagai instrumen strategis dalam mendorong efektivitas dan keberlanjutan pembangunan daerah.

3. Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan melalui Pembaruan Pengetahuan dan Adaptasi Regulasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemutakhiran pengetahuan perencana terhadap regulasi dan kebijakan terbaru merupakan faktor penting dalam menjamin keselarasan dokumen perencanaan antar-level pemerintahan. Pelatihan dan pengembangan kompetensi perencana secara berkelanjutan memungkinkan mereka untuk mampu menyesuaikan dokumen perencanaan dengan berbagai dinamika kebijakan nasional seperti perubahan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK), prioritas pembangunan nasional, serta tata ruang dan tematik pembangunan terkini. Kemampuan perencana dalam membaca perubahan kebijakan dan menerjemahkannya ke dalam dokumen perencanaan dapat mencegah munculnya masalah klasik seperti ketidaksinkronan antara RPJMD dengan Renstra OPD atau antara RKPD dengan penganggaran. Dengan demikian, pembaruan pengetahuan perencana tidak hanya berbicara tentang pemahaman regulatif, tetapi juga menciptakan fleksibilitas adaptif agar dokumen perencanaan tetap relevan dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi yang dikenalkan melalui pelatihan turut mendorong perencana untuk mengintegrasikan data digital dan sistem informasi dalam perencanaan, sehingga dokumen yang disusun semakin akurat, terukur, dan mampu mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang valid.

4. Kompetensi Perencana sebagai Penopang Prinsip *Good Governance*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki perencana tidak hanya berperan dalam aspek teknokratik penyusunan dokumen, tetapi juga menjadi faktor penentu penerapan prinsip *good local governance* dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Perencana dengan kemampuan komunikasi publik yang baik, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kecakapan dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat akan menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih akuntabel, inklusif, dan transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh menjadi proses tertutup yang hanya didorong oleh kepentingan birokrasi atau politik, melainkan harus menjamin keterwakilan kebutuhan masyarakat secara proporsional. Selain itu, kompetensi etika dan integritas perencana turut berperan dalam menjaga objektivitas perencanaan agar tidak terdistorsi oleh kepentingan sepihak yang dapat merugikan publik. Dengan demikian, peningkatan kapasitas perencana dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah melalui penyediaan dokumen perencanaan yang mampu menjadi instrumen kontrol publik, mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, serta memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai tujuan dan kepentingan masyarakat luas.

5. Profesionalisme Perencana Meningkatkan Integrasi dan Konsistensi Perencanaan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa profesionalisme perencana memiliki peran sentral dalam menciptakan integrasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah. Perencana yang memahami secara utuh hubungan fungsional antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi mampu memastikan bahwa dokumen seperti RPJMD, Renstra OPD, Renja, dan RKPD tersusun secara sinergis dan saling terhubung dalam satu alur logika pembangunan yang jelas. Kompetensi ini juga berdampak pada kemampuan perencana dalam menetapkan indikator kinerja yang terukur, target pembangunan yang realistis, serta program dan kegiatan yang relevan dengan permasalahan daerah. Profesionalisme yang dibentuk melalui tugas fungsional, kode etik, dan pembinaan kompetensi turut memperkuat posisi teknokratik perencana sehingga mereka dapat berperan aktif menjaga konsistensi arah pembangunan meskipun menghadapi dinamika kepentingan politik dan perubahan pimpinan daerah. Dengan demikian, semakin tinggi profesionalisme perencana, semakin kecil risiko terjadinya tumpang tindih perencanaan, duplikasi program, serta ketidaksesuaian antara perencanaan dan penganggaran yang kerap menjadi sumber inefisiensi dalam pembangunan daerah.

6. Teknologi dan Transformasi Digital Mendorong Kualitas Perencanaan

Analisis penelitian menunjukkan bahwa kemampuan perencana dalam memanfaatkan teknologi digital merupakan faktor krusial yang semakin menentukan kualitas perencanaan pembangunan di era modern. Pemanfaatan sistem informasi seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), basis data sektoral, *dashboard* monitoring pembangunan, serta teknologi

analisis spasial memungkinkan penyusunan dokumen perencanaan yang lebih akurat dan berbasis *real-time data*. Kompetensi teknologi juga mendorong keterbukaan informasi publik dan memperkuat proses *monitoring* dan *evaluating development progress* secara lebih efektif. Selain itu, kemampuan adaptif perencana terhadap perkembangan teknologi mendukung munculnya inovasi dalam perencanaan termasuk penggunaan platform kolaboratif dan media digital untuk mendorong partisipasi publik yang lebih luas. Transformasi digital tidak hanya mengubah cara bekerja, namun juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses perencanaan. Dengan demikian, perencana yang memiliki literasi digital yang baik akan mampu menghasilkan dokumen yang lebih responsif terhadap perubahan, mampu memprediksi risiko pembangunan, dan relevan dengan tuntutan tata kelola pemerintahan modern.

7. Tantangan Kompetensi Perencana dalam Praktik

Meskipun terdapat peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas, hasil penelitian juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih menghambat optimalisasi peran perencana di tingkat daerah. Variasi kapasitas antar daerah masih sangat lebar, terutama antara daerah maju dan daerah tertinggal, sehingga kualitas dokumen perencanaan tidak merata. Selain itu, struktur birokrasi yang lamban dan kurang adaptif terhadap perubahan seringkali membatasi ruang inovasi perencana dalam merancang solusi pembangunan yang progresif. Tekanan politik juga menjadi faktor yang berpotensi menggeser objektivitas perencanaan dari kebutuhan publik menuju kepentingan jangka pendek elite lokal. Di sisi lain, budaya pembelajaran berkelanjutan belum sepenuhnya tertanam dalam ekosistem birokrasi, menyebabkan sebagian perencana kesulitan mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi yang sangat dinamis. Keterampilan komunikasi publik yang belum memadai pada sebagian perencana juga berdampak pada lemahnya pelibatan masyarakat dalam setiap siklus perencanaan. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi perlu disertai reformasi kelembagaan dan dukungan kepemimpinan agar ekosistem perencanaan di daerah dapat berjalan secara profesional, inklusif, dan berorientasi pada penciptaan nilai publik.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh perencana merupakan elemen kunci yang secara signifikan memengaruhi kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pelatihan yang dilakukan secara terstruktur dan berjenjang terbukti mampu meningkatkan kapabilitas teknis, ketajaman analitis, serta pemahaman perencana terhadap regulasi perencanaan yang berlaku. Dengan dukungan kompetensi tersebut, perencana lebih siap dalam menyusun dokumen perencanaan yang selaras antarlevel dokumen, berbasis kebutuhan aktual pembangunan,

dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis. Temuan ini selaras dengan pandangan bahwa peningkatan kompetensi ASN merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, serta mampu menggerakkan pembangunan secara efektif (A. T. Wahyuni & Hariyoko, 2025). Dengan demikian, peran perencana tidak hanya sekadar menjalankan tugas teknis administratif, melainkan menjadi pilar strategis dalam memastikan efektivitas dan akuntabilitas kebijakan pembangunan yang dirumuskan pemerintah daerah.

Kemampuan analitis muncul sebagai aspek yang paling menentukan kualitas dokumen perencanaan. Perencana yang memiliki kecakapan dalam mengolah data, memahami indikator pembangunan, serta melakukan analisis situasi secara komprehensif akan lebih mampu merumuskan isu strategis yang relevan dan solusi programatik yang tepat. (Saifuddin, 2022) menegaskan bahwa kualitas dokumen tidak cukup dicapai hanya melalui kepatuhan pada format formal yang ditetapkan pemerintah pusat, tetapi mensyaratkan kemampuan intelektual untuk menerjemahkan persoalan publik ke dalam rancangan kebijakan yang terukur dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, analisis berbasis bukti (*evidence-based planning*) menjadi fondasi utama dalam menghasilkan perencanaan yang bermakna dan implementatif (A. Wahyuni & Rahmadanik, 2024).

Selain aspek teknis dan analitis, kompetensi sosial dan kemampuan kolaboratif perencana berperan penting dalam memperkuat nilai partisipatif dalam proses perencanaan daerah. Kemampuan membangun komunikasi konstruktif, menjalin koordinasi lintas sektor, serta memfasilitasi agregasi kepentingan masyarakat dalam forum-forum perencanaan akan menghasilkan dokumen yang lebih inklusif dan mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa proses penyusunan rencana pembangunan bukan hanya proses teknokratik, namun juga interaksi sosial yang membutuhkan keterampilan membangun kesepahaman bersama di antara para pemangku kepentingan. Dengan kemampuan sosial yang kuat, perencana menjadi aktor penting dalam penerapan prinsip *good governance* seperti transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas.

Penguasaan teknologi turut menjadi elemen penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan di era transformasi digital pemerintahan. Kemampuan perencana dalam menggunakan sistem informasi perencanaan, mengintegrasikan data *real-time*, serta memanfaatkan perangkat analisis digital membuat dokumen yang dihasilkan lebih akurat dan mudah dipantau kinerjanya (Sudianting & Seputra, 2019). Situasi ini menempatkan literasi digital sebagai salah satu kompetensi wajib yang harus dimiliki perencana modern agar mampu menjawab tantangan kompleksitas pembangunan sekaligus meningkatkan efisiensi tata kelola data perencanaan.

Di sisi lain, penelitian menemukan sejumlah tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah, seperti ketimpangan kompetensi antarwilayah, kultur birokrasi yang kurang mendukung pembelajaran berkelanjutan, serta intervensi politik yang dapat mengganggu objektivitas dalam

perumusan perencanaan. Tantangan ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas individu perlu dibarengi dengan reformasi kelembagaan yang menciptakan ruang bagi inovasi birokrasi dan profesionalisme aparatur (Aqila et al., 2022). Oleh karena itu, peningkatan kompetensi perencana seharusnya tidak berhenti pada pelatihan teknis, tetapi juga mencakup pengembangan lingkungan kerja yang kondusif, tata kelola yang transparan, dan kepemimpinan visioner agar perencanaan daerah dapat berjalan secara efektif, terukur, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Secara keseluruhan, temuan penelitian mengarah pada pemahaman bahwa perencana merupakan aktor strategis dalam sistem pembangunan daerah. Kompetensi yang kuat pada diri perencana berkontribusi langsung terhadap kualitas dokumen perencanaan, yang pada akhirnya menentukan bagaimana pembangunan dijalankan dan manfaat apa yang diterima masyarakat. Oleh sebab itu, strategi peningkatan kompetensi perencana harus dipandang sebagai upaya membangun *capacity to govern* kemampuan pemerintah untuk memerintah secara efektif dan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Penguatan kompetensi perencana juga berdampak pada peningkatan kualitas pengendalian pembangunan. Dengan pemahaman yang baik terhadap siklus perencanaan, perencana mampu memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang telah dirumuskan tidak hanya direncanakan dengan benar, tetapi juga diawasi dan dievaluasi dengan metode yang tepat. Kemampuan dalam *monitoring and evaluation* memberikan jaminan bahwa perencanaan tidak berhenti pada tahap penyusunan dokumen, melainkan terus dikawal hingga implementasi sehingga penyimpangan terhadap tujuan pembangunan dapat diminimalisasi (Fitrianti & Amri, 2023). Pada konteks ini, perencana berfungsi sebagai pengawal arah pembangunan daerah yang menjaga agar rencana pembangunan dapat menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi perencana juga berkorelasi dengan peningkatan kualitas argumentasi kebijakan dalam dokumen perencanaan. Perencana yang memiliki literasi kebijakan publik yang baik dapat menyajikan *policy reasoning* yang lebih kuat yaitu menjelaskan mengapa sebuah program harus dilaksanakan dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat (Puspaningtyas et al., 2024). Argumentasi yang jelas, logis, dan didukung oleh bukti lapangan akan meningkatkan kredibilitas dokumen sekaligus memudahkan komunikasi kebijakan kepada pemimpin daerah dan stakeholder lainnya. Dengan demikian, kompetensi perencana turut memperkuat posisi strategis unit perencanaan dalam proses pengambilan keputusan di pemerintah daerah.

Perencana dengan kompetensi kepemimpinan yang kuat mampu bertransformasi dari sekadar pelaksana menjadi agen perubahan dalam birokrasi daerah. Mereka dapat mendorong inovasi perencanaan, memperluas penggunaan data, serta meningkatkan budaya organisasi yang berorientasi

pada kinerja. Perencana seperti ini tidak hanya mengikuti arus kebijakan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi arah kebijakan publik melalui keahlian profesional dan integritas. Kehadiran perencana yang visioner menjadi modal penting untuk memperkuat kapasitas adaptif birokrasi dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks seperti ketimpangan wilayah, urbanisasi, dan perubahan iklim.

Di samping itu, temuan penelitian ini memperjelas bahwa adanya kebijakan nasional terkait jabatan fungsional perencana bukan hanya untuk memenuhi formalisasi struktur kepegawaian, tetapi untuk memastikan ada kelompok profesional yang secara khusus bertanggung jawab menjaga rasionalitas perencanaan di tengah fluktuasi kepentingan politik (Ilman & Fitri, 2021). Dalam konteks ini, perencana menjadi penyeimbang yang memastikan pembangunan daerah tetap berada pada koridor yang sesuai visi pembangunan jangka panjang dan bukan hanya mengakomodasi kepentingan jangka pendek penguasa. Hal ini menegaskan bahwa perencana memiliki peran penting dalam menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas pembangunan (Rahmawati & Ilman, 2023).

Temuan penelitian juga mengimplikasikan bahwa peningkatan kompetensi perencana harus menjadi bagian dari strategi peningkatan kemampuan pemerintah untuk mengelola pembangunan secara menyeluruh (*whole of government approach*) (Basyar et al., 2025). Artinya, keberhasilan pembangunan tidak hanya bertumpu pada satu sektor atau satu aktor, melainkan merupakan kolaborasi antarsektor yang terpadu dan difasilitasi oleh dokumen perencanaan yang kuat. Dengan demikian, kompetensi perencana menjadi fondasi bagi kolaborasi lintas perangkat daerah demi membangun sistem perencanaan yang efisien, terkoordinasi, dan mampu menjawab kebutuhan daerah secara komprehensif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi perencana yang mencakup kemampuan teknis, analitis, pemahaman regulasi, keterampilan sosial, hingga literasi digital memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menentukan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ketika perencana memiliki kapasitas yang memadai dalam seluruh aspek tersebut, dokumen perencanaan yang dihasilkan akan lebih akurat dalam menggambarkan permasalahan pembangunan, selaras antarlevel dokumen, serta mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat secara proporsional dan berbasis tata kelola yang akuntabel. Dengan kata lain, kualitas kompetensi perencana berbanding lurus dengan kemampuan pemerintah daerah dalam merancang pembangunan yang efektif dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan publik.

Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah memprioritaskan strategi peningkatan kompetensi perencana secara sistematis dan berkelanjutan

melalui penguatan program pendidikan dan pelatihan fungsional, dukungan implementasi sistem informasi perencanaan yang mutakhir, serta penciptaan ekosistem kerja yang kondusif bagi kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Reformasi kelembagaan birokrasi juga diperlukan untuk mengurangi hambatan struktural dan intervensi politik yang dapat mengganggu objektivitas perencanaan, sehingga profesionalisme perencana dapat berkembang secara optimal dalam lingkungan kerja yang mendukung integritas dan inovasi. Dengan demikian, peningkatan kompetensi perencana harus dipandang sebagai investasi strategis dalam memperkuat kapasitas pemerintahan daerah untuk melaksanakan pembangunan yang terarah, berkelanjutan, dan berorientasi pada penciptaan nilai publik yang nyata bagi masyarakat.

REFERENSI

- Adia, V. R., & Susetyo, I. B. (2022). *Birokrasi Dan Governansi Publik*. Penerbit P4i.
- Aidil, M., & Kusumawardhani, F. (2022). *Competency Development Of State Civil Apparatus (Asn) Of Planning (Planners) In The Meranti Islands Regency*. 15(2), 195–210.
- Wahyuni, A., & Rahmadanik, D. (2024). Analisis Kinerja Pelaksanaan Kepmenpan-Rb 11 Tahun 2024 Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(3), 91–105. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1199>
- Aqila, C., Ismail, H., & Wahyudi, E. (2022). Efektivitas Kinerja Pelayanan Kelurahan Wonokusumo Terhadap Program Padat Karya Dikembangkan Surabaya. In *Juli* (Vol. 2, Issue 04).
- Basyar, M. R., Mardiyanta, A., & Setijaningrum, E. (2025). Multi-Stakeholder Analysis In Building Tourism Resilience: Collaborative Governance Implementation In The Majapahit House Heritage Area, Indonesia. *Tourism And Hospitality*, 6(1), 5.
- Diklat, P. L., & Asn, S. K. (2025). Dinamika Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia (Msdm) Sumber Daya Manusia (Msdm) Sektor Publik Di Indonesia Sektor Publik Di Indonesia. *Manajemen Sumber Daya Manusia Di Sektor Publik-Strategi, Tantangan, Dan Inovasi Di Era Digital*, 21.
- Fitrianti, A., & Amri, M. (2023). *Effectiveness Of Local Government Information System On Planning Document Preparation At The Bpbd Of Pasangkayu Regency*. <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jpag>:<https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jpag>
- Ilman, G. M., & Fitrie, R. A. (2021). Agenda Setting Kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2020 Dengan Menggunakan Multiple Streams Framework. *Jurnal Transformative*, 7(1), 81–111.

- Ismail, N. N., Abdullah, A., & Ab Rahman, S. A. (2022). Evaluating Quality Delivery And Competency Of Planning Permission Submission By Professional Built Environment Profession In Selangor. *Asian People Journal (Apj)*, 5(2), 137–150. <https://doi.org/10.37231/apj.2022.5.2.462>
- Puspaningtyas, A., Mutia, F., & Ghazali. (2024). Civic Literacy In The Information Age: A Survey Of Vocational High School Student In Sidoarjo, Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2350109.
- Rahmawati, L. D., & Ilman, G. M. (2023). Proses Collaborative Governance Dalam Program Pengurangan Sampah Di Tpa Jabon, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Media Administrasi*, 8(2), 29–42.
- Saifuddin, R. (2022). "Kualitas Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbang*.
- Sedarmayanti, H. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia; Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Reflika Aditama.
- Setiawan, A. B. (2021). Pengembangan Kompetensi Aparatur Perencana Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Niara*, 13(2), 62–73.
- Sudianting, N. K., & Seputra, K. A. (2019). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Locus Majalah Ilmiah Fisip*, 11(2).
- Wahyuni, A. T., & Hariyoko, Y. (2025). Evaluasi Program Sekolah Orang Tua Hebat Di Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya Jawa Timur. *Juli*, 5(04).
- Zam, Y. Z. (2024). Evaluasi Kompetensi Terhadap Peningkatan Komitmen Dan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Asn). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 11042–11052.